

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
LAPORAN KEUANGAN



TRIWULAN III
PERIODE 30 SEPTEMBER 2023

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I
BATAM

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BTKLPP Kelas I Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Adapun penyusunan Laporan Keuangan ini dilakukan secara semester I, triwulan III dan tahunan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BTKLPP Kelas I Batam. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam rangka pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batam, Oktober 2023



Budi Santoso, SKM, MPH
NIP. 197109251995031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan.....	vii
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Basis Akuntansi	10
A.5. Dasar Pengukuran	10
A.6. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan Negara	20
B.2. Belanja Negara	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Aset Tetap	31
C.3. Aset Lainnya	34
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	36
C.5. Ekuitas	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	39
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	48
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Pos Luar Biasa	49
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
E.1. Ekuitas Awal	50
E.2. Surplus / Defisit LO	50
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	50
E.4. Lain-lain	51
E.5. Transaksi Antar Entitas	51
E.6. Kenaikan / Penurunan Ekuitas	52
E.7. Ekuitas Akhir	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	53
F.2. Pengungkapan Lain-lain	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Klasifikasi Kualitas Piutang 17
Tabel 2	Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap 18
Tabel 3	Perkembangan Anggaran BTKLPP Kelas I Batam Periode 30 September 2022..... 19
Tabel 4	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Periode 30 September 2022 20
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021 21
Tabel 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 30 September 2022 21
Tabel 7	Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Periode 30 September 2022 22
Tabel 8	Rincian Belanja Belanja Pegawai Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021 23
Tabel 9	Realisasi Belanja Barang Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021 ... 24
Tabel 10	Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021 24
Tabel 11	Realisasi Menurut Jenis Belanja Modal Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021 25
Tabel 12	Perbandingan Aset Lancar Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 . 27
Tabel 13	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 28
Tabel 14	Rincian Persediaan Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 29
Tabel 15	Rincian Persediaan Dalam Rangka Pananganan Covid-19 Periode 30 September 2022 30
Tabel 16	Rincian Aset Tetap Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 31
Tabel 17	Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 32
Tabel 18	Transfer Masuk di BTKLPP Kelas I Batam Periode 30 September 2022 32
Tabel 19	Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 33
Tabel 20	Mutasi Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 33
Tabel 21	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 35

Tabel 22	Mutasi Aset Tak Berwujud Periode 30 September 2022	35
Tabel 23	Mutasi Aset Lain-lain Periode 30 September 2022	36
Tabel 24	Perbandingan Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya Periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021	36
Tabel 25	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Periode 30 September 2022	37
Tabel 26	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021.....	39
Tabel 27	Rincian Beban Operasional Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021	40
Tabel 28	Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Periode 30 September 2022 Menurut LO dan LRA	41
Tabel 29	Rincian Beban Persediaan Periode 30 September 2022 dan Tahun 30 September 2021	42
Tabel 30	Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan Menurut LO dan LRA Periode 30 September 2022	42
Tabel 31	Rincian Beban Barang dan Jasa Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021	43
Tabel 32	Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Periode 30 September 2022 Menurut LO dan LRA	44
Tabel 33	Rincian Beban Pemeliharaan Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021	44
Tabel 34	Perbandingan Realisasi Beban Pemeliharaan Menurut LO dan LRA Periode 30 September 2022	45
Tabel 35	Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021	46
Tabel 36	Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas Menurut LO dan LRA Periode 30 September 2022.....	46
Tabel 37	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021.....	47
Tabel 38	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode 30 September 2022 dan 30 September 2021	48
Tabel 39	Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode 30 September 2022 Menurut LO dan LRA.....	49
Tabel 40	Jenis Transaksi Antar Entitas Periode 30 September 2022	51

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, Oktober 2023

Kepala



Budi Santoso, SKM, MPH
NIP. 197109251995031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam Triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2023.

Total Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 September 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp387.907.429,00 atau mencapai 78 Persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp500.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp10.840.606.600,00 atau mencapai 61 Persen dari alokasi anggaran sebesar Rp17.902.891.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp57.986.299.723,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp10.611.713.116,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp47.344.435.394,00. Piutang Jangka Pendek Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp30.151.213,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp799.739.792,00 dan Rp57.186.559.931,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp386.782.700,00 sedangkan jumlah beban sebesar Rp12.900.477.902,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai minus Rp12.513.695.202,00. Terdapat Surplus dari Kegiatan Non

Operasional sebesar Rp192.611.655,00 dan nilai Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00. Pada akhirnya entitas mengalami Defisit-LO sebesar minus Rp12.321.083.547,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp59.068.918.315,00 dikurangi Defisit-LO sebesar minus Rp12.321.083.547,00. kemudian ditambah koreksi-koreksi senilai minus Rp184.756.400,00. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.623.481.563,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah Rp57.186.559.931,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran (<i>Face</i>)
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Menurut Kelompok Pendapatan
Lampiran 3	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Lampiran 4	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19
Lampiran 5	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan
Lampiran 6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana / Program / Kegiatan / <i>Output</i>
Lampiran 7	Neraca (<i>Face</i>)
Lampiran 8	Neraca Percobaan Kas
Lampiran 9	Neraca Percobaan Akrua
Lampiran 10	Laporan Operasional
Lampiran 11	Laporan Operasional (<i>detail</i>)
Lampiran 12	Laporan Ekuitas
Lampiran 13	Laporan Ekuitas (<i>detail</i>)
Lampiran 14	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca
Lampiran 15	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

BTKLPP Kelas I Batam
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2023		% Thdp Angg	30 Sept 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	500,000,000	387,907,429	77.58	290,003,217
JUMLAH PENDAPATAN		500,000,000	387,907,429	77.58	290,003,217
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	5,830,498,000	4,737,576,995	81.26	4,603,658,129
Belanja Barang	B.4	10,379,833,000	5,536,821,605	53.34	7,488,202,490
Belanja Modal	B.5	1,692,560,000	566,208,000	33.45	99,248,500
Jumlah Belanja Operasi		17,902,891,000	10,840,606,600	60.55	12,191,109,119
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		17,902,891,000	10,840,606,600	60.55	12,191,109,119

BTKLPP Kelas I Batam
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 September 2023	30 September 2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	386,782,700	280,713,000	106,069,700	37.79
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	386,782,700	280,713,000	106,069,700	37.79
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	386,782,700	280,713,000	106,069,700	37.79
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	4,949,033,839	4,815,648,801	133,385,038.00	2.77
Beban Persediaan	305,610,580	2,382,467,326	(2,076,856,746.00)	(87.17)
Beban Barang dan Jasa	3,792,885,568	3,198,043,060	594,842,508.00	18.60
Beban Pemeliharaan	503,095,351	650,531,866	(147,436,515.00)	(22.66)
Beban Perjalanan Dinas	1,036,301,506	1,140,281,441	(103,979,935.00)	(9.12)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0
Beban Bunga	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,313,551,058	2,389,551,031	(75,999,973.00)	(3.18)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Beban Transfer	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	12,900,477,902	14,576,523,525	(1,676,045,623.00)	(11.50)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,513,695,202)	(14,295,810,525)	1,782,115,323.00	(12.47)

Sambungan Laporan Operasional

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 September 2023	30 September 2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN NON OPERASIONAL				73.91
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	5,612,000	(5,612,000.000)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	5,612,000	(5,612,000)	-
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192,611,655	3,806,842	188,804,813	4959.62
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192,611,655	3,806,842	188,804,813	4959.62
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	192,611,655	9,418,842	183,192,813	1,944.96
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(12,321,083,547)	(14,286,391,683)	1,965,308,136	(13.76)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(12,321,083,547)	(14,286,391,683)	1,965,308,136	(13.76)

BTKLPP Kelas I Batam
NERACA
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Jumlah (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	30 September 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	190,000,000	0	190,000,000	0.00
Kas Lainnya dan setara Kas	83,510,200	0	0	0.00
Piutang Bukan Pajak	304,926	0	0	0.00
Persediaan	10,337,897,990	9,953,414,250	384,483,740	3.86
JUMLAH ASET LANCAR	10,611,713,116	9,953,414,250	658,298,866	6.61
ASET TETAP				
Tanah	18,442,022,000	18,442,022,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	55,430,449,730	55,243,797,330	186,652,400	0.34
Gedung dan Bangunan	14,063,979,000	14,063,979,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50,161,000	50,161,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(40,642,176,336)	(38,714,833,763)	(1,927,342,573)	4.98
JUMLAH ASET TETAP	47,344,435,394	49,085,125,567	(1,740,690,173)	(3.55)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	599,437,000	698,437,000	-99,000,000	-14.17
Aset Lain-lain	2,023,493,780	1,553,938,180	469,555,600	30.22
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2,601,779,567)	(2,221,996,682)	(379,782,885)	17.09
JUMLAH ASET LAINNYA	30,151,213	30,378,498	(227,285)	(0.75)
JUMLAH ASET	57,986,299,723	59,068,918,315	(1,082,618,592)	(1.83)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Kepada Pihak Ketiga	420,683,044	0	290,840,672	
Utang Yang Belum Ditagihkan	189,056,748	0	189,056,748	-
Uang Muka dari KPPN	190,000,000	0	190,000,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	799,739,792	0	799,739,792	-
JUMLAH KEWAJIBAN	799,739,792	0	799,739,792	-
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	57,186,559,931	59,068,918,315	(1,882,358,384)	(3.19)
JUMLAH EKUITAS	57,186,559,931	59,068,918,315	(1,882,358,384)	(3.19)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	57,986,299,723	59,068,918,315	(1,082,618,592)	(1.83)

BTKLPP Kelas I Batam
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan / (Penurunan)	
	30 September 2023	30 September 2022	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	59,068,918,315	61,692,169,831	(2,623,251,516)	(4.25)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12,340,458,547)	(14,286,391,683)	1,945,933,136	(13.62)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(184,756,400)	-	(184,756,400)	-
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
Koreksi atas Reklasifikasi	0	-	0	-
Selisih Revaluasi Aset	0	-	0	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(184,756,400)	0	(184,756,400)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,642,856,563	14,161,640,794	-3,518,784,231	(24.85)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,697,601,984)	(124,750,889)	-1,572,851,095	1,260.79
EKUITAS AKHIR	57,371,316,331	61,567,418,942	(4,196,102,611)	(6.82)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BTKLPP Kelas I Batam

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit yang mempunyai wilayah kerja regional meliputi Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi. Pendirian UPT ini merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/MENKES/PER/IX/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. BTKLPP Kelas I Batam

yang berkedudukan di Kelurahan Sei. Binti - Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

BTKLPP Kelas I Batam bertugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu dan kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit, dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Dalam melaksanakan tugasnya BTKLPP Kelas I Batam menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan Surveilans Epidemiologi, Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), Laboratorium Rujukan, Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna, Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi serta pelaksanaan Penilaian dan Respon Cepat, Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah dan Bencana.

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud Kantor BTKLPP Kelas I Batam berkomitmen sebagai “***Sentra Pengendalian Penyakit dan Faktor Risiko Berbasis Uji, Kaji dan Solusi.***” Untuk mewujudkannya akan dilakukan langkah-langkah strategis berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan surveilans epidemiologi melalui pengembangan jejaring kerja kemitraan dan diseminasi informasi hasil penilaian faktor risiko lingkungan dan perilaku terhadap penyakit.
2. Meningkatkan pelaksanaan ADKL melalui identifikasi sumber pencemaran lingkungan dan pengambilan sampel lingkungan.
3. Meningkatkan pelaksanaan laboratorium rujukan melalui penyelenggara laboratorium lingkungan dan laboratorium penyakit yang berkualitas untuk melayani kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan model teknologi tepat guna melalui pengkajian teknologi spesifikasi lokal.
5. Meningkatkan pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi dalam upaya menjamin konsistensi mutu pengujian laboratorium
6. Meningkatkan pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah bencana.
7. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM.

8. Meningkatkan pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang cepat, tepat dan akurat.

Langkah-langkah strategis tersebut mulai dapat diterapkan dengan optimal di Triwulan III Tahun Anggaran 2023, mengingat pandemi Covid-19 di Semester II Tahun 2023 ini sudah di cabut, hingga laporan ini ditulis pertumbuhan perekonomian dan keuangan khususnya dalam pengelolaan APBN mulai Nampak pertumbuhannya semenjak Kasus Pandemi Covid 19 dicabut oleh Pemerintah.

Dengan di cabutnya Kasus Pandemi Covid 19 oleh Pemerintah diharapkan semua pelayanan Pemerintah dan Swasta bisa berjalan normal seperti biasanya. Sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan normal. Dan Anggaran Kementerian dan Lembaga bisa dilaksanakan dengan optimal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang berakhir 30 September 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BTKLPP Kelas I Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

BTKLPP Kelas I Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan pada Satuan Kerja BTKLPP Kelas I Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Demikian pula halnya dengan kewajiban juga dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BTKLPP Kelas I Batam. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Berikut diuraikan beberapa kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BTKLPP Kelas I Batam.

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada BTKLPP Kelas I Batam sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - 2) Pendapatan Jasa Uji Laboratorium diakui secara proporsional setelah Sertifikat Hasil Uji Keluar;

- 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- c. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Negara.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

5.1. Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- c. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan dan diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca, dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

5.2. Aset Tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

5.3. Piutang Jangka Panjang

- a. Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- b. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan

bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

5.4. Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Tabel 1 menampilkan kriteria kualitas piutang.

Tabel 1
Klasifikasi Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014

9. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel 2 berikut menampilkan klasifikasi masa manfaat aset tetap.

Tabel 2
Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

10. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai Tahun 2018 Pemerintah telah mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. *Pertama*, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. *Kedua*, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan Tahun 2018.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan 30 September 2023 BTKLPP Kelas I Batam telah melakukan empat kali revisi DIPA dari DIPA awalnya. Adapun pagu awal pada BTKLPP Kelas I Batam tercatat Rp19.054.057.000,00 menjadi Rp17.902.891.000,00 pada DIPA yang telah direvisi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Perkembangan Anggaran BTKLPP Kelas I Batam
Periode 30 September 2023

Jenis Belanja		Jumlah Pagu (Rp)	
Akun	Uraian	DIPA Awal	DIPA Setelah Revisi
51	Belanja Pegawai	6,981,664,000	5,830,498,000
52	Belanja Barang	10,379,833,000	10,379,833,000
53	Belanja Modal	1,692,560,000	1,692,560,000
Jumlah		19,054,057,000	17,902,891,000

Revisi DIPA ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi pada anggaran belanja satuan kerja sampai dengan triwulan III periode 30 september 2023 ini ada perubahan pada belanja pegawai ini disebabkan adanya penarikan anggaran blokir AA belanja pegawai dari BA 024 ke BA BUN.

Selama periode yang berakhir 30 September 2023 terjadi 4 kali Revisi DIPA yaitu Ada pun DIPA awal terbit tanggal 26 Desember 2022 dan DIPA revisi ke 2 tanggal 16 Februari 2023 dan DIPA revisi ke 3 tanggal 05 April 2023 serta DIPA revisi ke 4 tanggal 12 Juli 2023 dengan Anggaran semula sebesar Rp.19.054.057.000,00. menjadi sebesar Rp.17.902.891.000,00

Sedangkan pada akun belanja barang dan akun belanja modal tidak terjadi pengurangan anggaran setelah DIPA direvisi. Revisi DIPA BTKLPP Kelas I Batam ini telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Realisasi Pendapatan
Rp387.907.429,00

B.1. Pendapatan Negara

Secara total Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 September 2023 sebesar Rp387.907.429,00 atau 78 Persen dari estimasi awal yaitu Rp500.000.000,00. Sedangkan dilihat dari jenis pendapatan yang memiliki target awal hanya berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi di Bidang Kesehatan dengan nilai realisasi Rp360.825.000,00 atau 72,17 Persen. Sisanya 5,83 Persen lagi atau Rp27.082.429,00 realisasi PNBP yang diterima BTKLPP Kelas I Batam tidak diestimasi sebelumnya. Lebih jelasnya Tabel 4 memperlihatkan rincian estimasi pendapatan dan realisasi yang diperoleh.

Tabel 4
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Periode 30 September 2023

Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	500,000,000	360,825,000	72.17
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0.00	17,657,700	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	7,820,000	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0.00	1,124,729	-
Pendapatan layanan penelitian/riset dan pengembangan Iptek	0.00	480,000	-
Jumlah	500,000,000	387,907,429	77.58

Tabel 4 memperlihatkan bahwa ada beberapa pendapatan yang tidak diestimasi sebelumnya seperti Pendapatan Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan Pendapatan layanan penelitian/riset dan pengembangan Iptek. Secara umum, bila diperhatikan dari target yang diestimasi sebelumnya diketahui bahwa pendapatan memenuhi target pendapatan sampai triwulan III periode 30 September 2023, ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa tidak adanya lagi kasus pandemi Covid-19 atau di cabutnya status pandemi Covid-19 di Indonesia. Sehingga jumlah pendapatan bisa dicapai sesuai target. Jika dibanding pendapatan tahun lalu periode 30 September 2022 sebesar

Rp290.003.217,00. dengan periode 30 September 2023 sebesar Rp387.907.429,00. Tabel 5 menampilkan secara rinci besaran masing-masing jenis penerimaan negara hingga 30 September Tahun 2023 dan 30 September 2022.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian Jenis PNB	Realisasi PNB 30 September (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya		5,612,000	(5,612,000)	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	360,825,000	276,573,000	84,252,000	30.46
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	7,820,000	4,140,000	3,680,000	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu		393,000	(393,000)	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	1,124,729	3,285,217	(2,160,488)	(65.76)
Pendapatan layanan penelitian/riset dan penembangan Iptek	480,000			
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaanpemerintah	17,657,700		17,657,700	-
Jumlah	387,907,429	290,003,217	97,904,212	33.76

Secara komparatif realisasi PNB Triwulan III yang berakhir 30 September 2023 sebesar Rp387.907.429,00 atau mengalami kenaikan sebesar 33,76 Persen dibandingkan periode 30 September 2022 yang mampu membukukan pendapatan Rp290.003.217,00

Realisasi Belanja Negara
Rp10.840.606.600,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja BTKLPP Kelas I Batam pada Triwulan III Tahun 2023 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp10.840.606.600,00 atau 60,55 Persen dari anggaran Rp17.902.891.000,00 seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Periode 30 September 2023

Jenis Belanja		Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Persentase (%)
Akun	Uraian			
51	Belanja Pegawai	5,830,498,000	4,737,576,995	81.26
52	Belanja Barang	10,379,833,000	5,536,821,605	53.34
53	Belanja Modal	1,692,560,000	566,208,000	33.45
Jumlah		17,902,891,000	10,840,606,600	60.55

Dari ketiga jenis belanja seperti pada Tabel 6 diketahui bahwa belanja pegawai memiliki nilai realisasi *netto* tertinggi yaitu 81,26 Persen atau

Rp4.737.576.995,00 dari anggaran Rp5.830.498.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang sebesar Rp5.536.821.605,00 dari pagu Rp10.379.833.000,00 atau 53,34 Persen. Sedangkan nilai realisasi paling rendah yaitu anggaran belanja modal sebesar Rp566.208.500,00 dari pagu Rp1.692.560.000,00.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Menurut Jenis Belanja
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Jenis Belanja		Realisasi Belanja Netto 30 September (Rp)		Naik / (Turun)	
Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	4,737,576,995	4,603,658,129	133,918,866	2.91
52	Belanja Barang	5,536,821,605	7,488,202,490	(1,951,380,885)	(26.06)
53	Belanja Modal	566,208,000	99,248,500	466,959,500	470.50
Jumlah		10,840,606,600	12,191,109,119	(1,350,502,519)	(11.08)

Sampai dengan 30 September Tahun 2023 terjadi penurunan realisasi yaitu sebesar minus 11,08 Persen atau sebanyak Rp10.840.606.600,00 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022 yang realisasi *netto*-nya sebesar Rp12.191.109.119,00. Menurunnya angka realisasi Tahun 2023 cukup beralasan karena jumlah anggaran mengalami penurunan yang sangat besar dari Tahun 2022 sebagai dampak dari di cabutnya kasus pandemi Covid-19. Uraian berikut menjelaskan perkembangan jenis belanja dan perbandingannya dengan 30 September Tahun 2022.

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai secara *netto* Periode 30 September Tahun 2023 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 6 sebesar Rp4.737.576.995,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan 30 September Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp133.918.866,00 atau 2,91 Persen, seperti terlihat pada Tabel 7. Kenaikan realisasi belanja pegawai disebabkan adanya kenaikan pangkat dan kenaikan tunjangan fungsional PNS BTKLPP Kelas I Batam. Pada Tabel 8 di jelaskan dengan rincian belanja pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai
Rp4.737.576.995,00

Tabel 8
Rincian Belanja Pegawai
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian Jenis	Realisasi Belanja Pegawai 30 September (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,803,068,100	1,734,636,900	68,431,200	3.94
Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,243	28,628	(4,385)	(15.32)
Belanja Tunjangan-tunjangan	545,293,338	537,779,198	7,514,140	1.40
Belanja Uang Makan	199,600,000	231,200,000	(31,600,000)	(13.67)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2,189,591,314	2,096,532,403	93,058,911	4.44
Belanja Uang Lembur	-	3,481,000	(3,481,000)	(100.00)
Jumlah	4,737,576,995	4,603,658,129	133,918,866	2.91

Ada enam item pada Tabel 8 yang menjadi pembentuk akun belanja pegawai, dari seluruh item tersebut yang mengalami kenaikan yaitu belanja tunjangan khusus/kegiatan sebesar 4,44 Persen, diikuti belanja gaji pokok sebesar 3,94 Persen dan belanja tunjangan-tunjangan sebesar 1,40 Persen. Sedangkan item belanja pegawai yang mengalami penurunan yang yaitu belanja pembulatan gaji PNS sebesar 15,32 Persen, belanja uang makan 13,67 Persen dan belanja uang lembur 100 Persen. Ada pun Belanja uang lembur sampai dengan periode 30 September 2023 belum terealisasi ini dikarenakan pagu uang lembur masih diblokir.

Belanja Barang
Rp5.536.821.605,00

B.2.2. Belanja Barang

Tabel 9 memperlihatkan realisasi belanja barang pada Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.536.821.605,00 dan Rp7.488.202.490,00 atau mengalami penurunan yaitu sebesar 26,06 Persen. Lebih lanjut di dalam Tabel 9 menampilkan rincian realisasi belanja barang pada BTKLPP Kelas I Batam.

Tabel 9
Realisasi Belanja Barang
Per 30 September 2023 dan 30 September 2022

Akun	Uraian Jenis	Realisasi per 30 September (Rp)		Naik / (Turun)	
		Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1,045,514,384	1,040,594,158	4,920,226	0.47
5212	Belanja Barang Non Operasional	1,136,839,042	493,969,223	642,869,819	130.14
5218	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	519,436,928	2,930,656,934	(2,411,220,006)	(82.28)
5221	Belanja Jasa	1,420,675,102	1,524,465,087	(103,789,985)	(6.81)
5231	Belanja Pemeliharaan	480,974,351	376,121,647	104,852,704	27.88
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	933,381,798	1,122,395,441	(189,013,643)	(16.84)
5261	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
Jumlah		5,536,821,605	7,488,202,490	(1,951,380,885)	(26.06)

Di antara penyebab terjadinya penurunan belanja barang ini dipicu oleh adanya penurunan anggaran belanja barang konsumsi penanganan covid-19 karena tidak adanya lagi kasus pandemi covid-19, sehingga Realokasi anggaran untuk percepatan ekonomi nasional dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2022 lebih besar yaitu Rp14.850.489.000,00. Jika dibandingkan Tahun 2023 hanya sebesar Rp10.379.833.000,00. Dari jumlah tersebut terserap Rp5.536.821.605,00 atau 53,04 Persen sebagaimana terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Periode 30 September 2023

Akun	Uraian Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	327,339,000	122,400,000	37.39
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0
524115	Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Penelitian Covid-19	0	0	0
Jumlah Belanja		327,339,000	122,400,000	37.39

Ada tiga jenis belanja yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19 seperti terlihat pada Tabel 10 baik berupa persediaan belanja non operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas. Dari ketiga akun tersebut hanya satu akun yang ada anggarannya yaitu akun persediaan penanganan pandemic covid 19 yang memiliki realisasi yang mencapai 37,39 Persen atau Rp122.400.000,00 dari anggaran sebesar Rp327.339.000,00. Sedangkan akun yang lain tidak ada anggarannya lagi di karenakan sudah tidak adanya lagi kasus pandemi covid 19.

Belanja Modal
Rp566.208.000,00

B.2.3. Belanja Modal

Di dalam Tabel 3 telah dijelaskan bahwa DIPA awal nilai belanja modal sebesar Rp1.692.560.000,00 walaupun dalam periode yang berakhir 30 September 2023 terjadi empat kali Revisi namun saldo belanja modal tetap dengan nilai realisasi sebesar Rp566.208.000,00. Untuk lebih jelasnya rincian belanja modal ini dapat dilihat pada uraian berikut:

Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Rp566.208.000,00

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun belanja modal pada BTKLPP Kelas I Batam Periode 30 September Tahun 2023 ada dua jenis belanja modal yaitu belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp609.380.000,00 terealisasi sebesar Rp566.208.000,00 atau sebesar 92,92 Persen serta akun belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp1.083.180.000,00 dengan realisasi Rp0.,00 , Sedangkan periode 30 september 2022 jenis belanja modal juga ada dua jenis yaitu belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp1.440.840.000,00 terealisasi sebesar Rp99.248.500,00 atau

sebesar 6,88 Persen serta akun belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp9.814.409.000,00 dengan realisasi Rp0,00. Tabel 11 berikut merincikan perkembangan realisasi belanja modal.

Tabel 11
Realisasi Menurut Jenis Belanja Modal
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian	Realisasi 30 September (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Peralatan dan Mesin	566,208,000.00	99,248,500.00	466,959,500.00	100.00
Belanja modal Upah Tenaga Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	566,208,000	99,248,500	466,959,500	100.00

Dari anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin Periode 30 September 2023 sebesar Rp609.380.000,00 terealisasi sebesar Rp566.208.000 atau 92,92 Persen. Sedangkan belanja modal gedung dan bangunan belum terealisasi sampai periode 30 September 2023.

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Rp0,00

B.2.3.2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Realisasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00

B.2.3.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

*Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Rp0,00*

B.2.3.4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Belanja Modal Lainnya Rp0,00

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Pada Triwulan III periode 30 September 2023 ini Wabah Covid-19 sudah dinyatakan tidak ada lagi dimungkinkan berdampak pada pos aset lancar dalam Neraca, terutama pada pos Persediaan. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan atas pos-pos Neraca tahun berjalan dan sebagai pembandingnya adalah periode 31 Desember 2022.

Aset Lancar

Rp10.611.743.116,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 September 2023 sebesar Rp10.611.743.116,00 yang berasal dari akun kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya dan setara kas, piutang bukan pajak dan persediaan. Sedangkan nilai aset lancar per 31 Desember 2022 mencapai Rp9.953.414.250,00 yang berasal dari akun persediaan. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Perbandingan Aset Lancar
Per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

Aset Lancar	Aset Lancar (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Sept 2023	31 Des 2022	Jumlah (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	190,000,000	-	190,000,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	83,510,200	-	83,510,200	-
Piutang Bukan Pajak	304,926	-	304,926	-
Persediaan	10,337,897,990	9,953,414,250	384,483,740	3.86
Jumlah	10,611,713,116	9,953,414,250	658,298,866	6.61

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa nilai persediaan periode 30 September 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,86 Persen dibandingkan dengan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 dari Rp9.953.414.250,00 menjadi Rp10.611.713.116,00. Uraian berikut menjelaskan masing-masing nilai dari aset lancar tersebut.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp190.000.000,00*

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp190.000.000,00 dan Rp0,00. Angka ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran serta berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tertera pada Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	Rincian Kas (Rp)	
	30 September 2023	31 Desember 2022
Uang Tunai	0.00	0.00
Uang Muka (Voucher)	0.00	0.00
Uang di Rekening Bank Mandiri	30,167,272	0.00
Kwitansi yang Belum di-SPJ-kan	159,832,728	0.00
Jumlah	190,000,000	0.00

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp83.510.200,00*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp83.510.200,00. Dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Ini merupakan perjalanan Dinas yang di LS kan oleh Bendahara

Persediaan

Rp10.337.897.990,00

C.1.4. Persediaan

Nilai Persediaan periode yang berakhir tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp10.337.897.990,00 dan Rp9.953.414.250,00 atau terjadi kenaikan realisasi sebesar 3,86 Persen. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 seperti tercatat pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Persediaan
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

Persediaan	Nilai Rincian Persediaan (Rp)		Selisih	
	30 Sept 2023	31 Des 2022	Rp	%
Barang Konsumsi	2,944,486,478	2,570,958,424	373,528,054	14.53
Suku Cadang	298,994,836	298,994,836	-	-
Bahan Baku	7,005,843,046	6,997,432,360	8,410,686	0.12
Persediaan Lainnya	85,741,130	85,741,130	0.00	0.00
Bahan untuk Pemeliharaan	2,832,500	287,500	2,545,000	885.22
Jumlah	10,337,897,990	9,953,414,250	384,483,740	3.86

Kenaikan persediaan tertinggi terjadi pada Bahan untuk pemeliharaan sebanyak 885,22 Persen, kemudian disusul barang konsumsi sebesar 14,53 Persen, dan bahan baku 0,12 Persen. Sedangkan persediaan dalam bentuk suku cadang dan persediaan lainnya masih dalam jumlah yang sama dibandingkan Tahun 2022.

Sementara itu, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 BTKLPP Kelas I Batam nilai persediaannya mencapai Rp122.400.000,00 dari pagu sebesar Rp327.339.000,00. Akun persediaan penanganan pandemi Covid-19 ini berupa sisa persediaan yang dibeli sendiri atau transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 30 September 2023. Dari fakta lapangan menunjukkan bahwa khusus untuk persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 baik yang berasal

dari pembelian sendiri/hibah/transfer hingga tanggal pelaporan sudah habis digunakan seperti terlihat pada Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Persediaan Dalam Rangka Pananganan Covid-19
Periode 30 September 2023

No	Nama Barang Persediaan	Tgl Dok	Tgl. Buku	Jml (Unit)	Sisa Persediaan	Kondisi Persediaan
		Tahun 2023				
1.	MBiocov-19 RT PCR Kit 0821	23 Agus	31 Agus	120	120	Baik
2.	PCR-Filter Pippette Tips-Long	20 Agus	31 Agus	30	30	Baik
3.	Disposable Virus Sampling	7 Sept	30 Sept	200	200	Baik
4.	Qiaprep & Viral RNA Um Kit	27 Juli	31 Agus	1	1	Baik
5.	Fosun 0721	25 Agus	31 Agus	130	130	Baik
6.	Fosun 0721	05 Agus	31 Agus	100	100	Baik
7.	Allplex SARS-Cov-2 Assay 0921	28 Sept	30 Sept	11	11	Baik
8.	Centrifuge Tube 1,5 ml 0921	28 Sept	30 Sept	500	500	Baik
9.	Multiple Real Time PCR Kit For	17 Sept	30 Sept	120	120	Baik
10.	Multiple Real Time PCR	7 Sept	30 Sept	20	20	Baik
11.	Alkohol 70% 0821	31 Agus	30 Sept	100	100	Baik
12.	Nasopharyngeal Swab 0521	7 Sept	30 Sept	80	80	Baik
13.	Allplex SARS-Cov-2 Assay 0921	24 Sept	30 Sept	200	200	Baik
14.	XPRSARS Cov-2-10 XPert Sars	7 Sept	30 Sept	30	30	Baik
15.	Nasopharyngeal Swab Dituted	16 Sept	30 Sept	204	204	Baik
16.	Optical 8-Cap Strip Flat (120)	8 Sept	30 Sept	10	10	Baik
Jumlah				1856	1856	Baik

Uang Muka dari KPPN
Rp190.000.000,00

C.1.5. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp190.000.000,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara

Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Aset Tetap

Rp47.344.435.394,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp47.344.435.394,00 dan Rp49.085.125.567,00 atau terjadi penurunan 3,55 Persen atau sebesar minus Rp1.740.690.173,00. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Aset Tetap
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Jumlah (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Sept 2023	31 Des 2022	Jumlah (Rp)	%
Tanah	18,442,022,000	18,442,022,000	-	-
Peralatan dan Mesin	55,430,449,730	55,243,797,330	186,652,400	0.34
Gedung dan Bangunan	14,063,979,000	14,063,979,000	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50,161,000	50,161,000	-	-
Akumulasi Penyusutan	(40,642,176,336)	(38,714,833,763)	(1,927,342,573)	4.98
Jumlah	47,344,435,394	49,085,125,567	(1,740,690,173)	(3.55)

Tanah

Rp18.442.022.000,00

C.2.1. Tanah

Nilai buku aset tetap berupa tanah yang dimiliki BTKLPP Kelas I Batam periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 tidak mengalami penambahan yaitu Rp18.442.022.000,00. Adapun aset tetap berupa tanah ini memiliki luas 14.970 m² yang berlokasi di Kelurahan Sei Binti - Kecamatan Sagulung Kota Batam dan digunakan sebagai Gedung Kantor BTKLPP Kelas I Batam.

Peralatan dan Mesin

Rp55.430.449.730,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan peralatan dan mesin per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp55.430.449.730,00 dan Rp55.243.797.330,00. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 30 September 2023 sebesar Rp38.772.556.566,00 sehingga nilai

buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp16.657.893.164,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan seperti terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17
Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	55,243,797,330
Mutasi tambah	186,652,400
- Pembelian	186,652,400
- Transfer Masuk	
Mutasi kurang	0
Nilai Perolehan per 30 Sept 2023	55,430,449,730
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Sept 2023	(38,772,556,566)
Nilai Buku per 30 Sept 2023	16,657,893,164

Adapun mutasi tambah dalam bentuk peralatan dan mesin dapat dilihat sebagaimana tertera pada Tabel 18.

Tabel 18
Transfer Masuk di BTKLPP Kelas I Batam
Periode 30 September 2023

Uraian	Jumlah (Unit)	Harga (Rp)	Penyusutan	Nilai Buku
Dropping Dari Kantor Pusat	0	0	0	0
Pembelian belanja peralatan dan mesin berupa mobil file	1	57,000,000		57,000,000
Pembelian belanja peralatan dan mesin berupa lemari arsip	1	2,200,000		2,200,000
Pembelian belanja peralatan dan mesin berupa lemari penyimpanan APD	2	4,400,000		4,400,000
Pembelian belanja peralatan dan mesin berupa filling cabinet	2	2,468,000		2,468,000
Pembelian belanja peralatan dan mesin berupa Laptop	1	11,648,500		11,648,500
Pembelian belanja peralatan dan mesin berupa Printer	3	7,332,000		7,332,000
Pembelian belanja peralatan dan mesin berupa Sound System Outdoor	1	14,200,000		14,200,000
Jumlah	11	99,248,500	0	99,248,500

Tidak terdapat Transfer masuk pada periode 30 September 2023 barang dropping dalam bentuk apa pun. Transfer masuk hanya dari pembelian.

Gedung dan Bangunan
Rp14.063.979.000,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

masing-masing nilainya sama yaitu Rp14.063.979.000,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan sebagaimana terlihat pada Tabel 19.

Tabel 19
Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	14,063,979,000
Mutasi tambah	0
Mutasi kurang	0
Nilai Perolehan per 30 Sept 2023	14,063,979,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Sept 2023	(1,852,574,520)
Nilai Buku per 30 September 2023	12,211,404,480

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp50.161.000,00*

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sama nilainya yaitu Rp50.161.000,00 atau dengan kata lain tidak terjadi kenaikan terhadap aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan sebagaimana yang terlihat pada Tabel 20.

Tabel 20
Mutasi Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	50,161,000
Mutasi tambah	0
Mutasi kurang	0
Nilai Perolehan per 30 September 2023	50,161,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(17,045,250)
Nilai Buku per 30 Sept 2023	33,115,750

*Aset Tetap Lainnya
Rp0,00*

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan untuk periode yang berakhir pada periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp40.642.176.336,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp40.642.176.336,00) dan (Rp38.714.833.763,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 September 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan 30 September 2023			Nilai Perolehan 31 Desember 2022		
		Jumlah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	55,430,449,730	38,772,556,566	16,657,893,164	55,243,797,330	37,156,406,258	18,087,391,072
2	Gedung dan Bangunan	14,063,979,000	1,852,574,520	12,211,404,480	14,063,979,000	1,543,674,280	12,520,304,720
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	50,161,000	17,045,250	33,115,750	50,161,000	14,753,225	35,407,775
	Jumlah	69,544,589,730	40,642,176,336	28,902,413,394	69,357,937,330	38,714,833,763	30,643,103,567

Aset Lainnya
Rp30.151.213,00

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp30.151.213,00 dan Rp30.378.498,00. Aset Lainnya merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud periode yang berakhir 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing nilainya yaitu Rp599.437.000,00. Dan Rp698.437.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa *software* komputer untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud per 30 September 2023 disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22
Mutasi Aset Tak Berwujud
Periode 30 September 2023

Uraian	Jumlah
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	698,437,000
Mutasi tambah	0
Mutasi kurang	0
Nilai Perolehan per 30 September 2023	599,437,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(698,437,000)
Nilai Buku per 30 September 2023	(Rp99,000,000)

C.3.2. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain periode yang berakhir 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing nilainya yaitu sebesar Rp2.032.493.780,00. Dan Rp1.553.938.180,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun mutasi aset lainnya terlihat pada Tabel 23.

Tabel 23
Mutasi Aset Lain-lain
Periode 30 September 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1,553,938,180
Mutasi tambah	478,555,600
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Nilai Perolehan per 30 September 2023	2,032,493,780
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(1,652,710,895)
Nilai Buku per 30 September 2023	Rp379,782,885

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp2.601.779.567,00)*

C.3.4. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing (Rp2.601.779.567,00) dan (Rp2.221.996.682,00) sebagaimana terlihat pada Tabel 24. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 24
Perbandingan Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya
Periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi	
		30 September 2023 (Rp)	31 Desember 2022
1.	Aset Tak Berwujud	599,437,000	698,437,000
2.	Aset Lain-lain	2,032,493,780	1,553,938,180
Jumlah		2,631,930,780	2,252,375,180

Adapun rincian dari Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya khususnya periode 30 September 2023 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Periode 30 September 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	599,437,000	698,437,000	(99,000,000)
Aset Lain-lain	2,032,493,780	1,553,938,180	478,555,600
Jumlah	2,631,930,780	2,252,375,180	379,555,600

Kewajiban Jangka Pendek
Rp799.739.792,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp799.739.792,00 dan Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, yaitu utang kepada pihak ketiga.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp420.683.044,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp420.683.044,00 dan Rp0,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan berupa Belanja Pegawai berupa Gaji induk bulan Oktober 2023 dan Perjalanan Dinas yang di LS Bendahara, Upah PPNPN dalam bulan berjalan tahun 2023.

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp189.056.748,00

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp189.056.748,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan Kwitansi bendahara yang belum dipertanggung jawaban

Uang Muka Dari KPPN
Rp190.000.000,00

C.4.3. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka Dari KPPN periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp190.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka Dari KPPN ini merupakan persekot uang muka untuk melakukan kegiatan

operasional sehari-hari perkantoran setiap bulannya.

Ekuitas

Rp57.186.559.931,00

C.5. Ekuitas

Ekuitas periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp57.186.559.931,00. dan Rp61.567.418.942,00. atau mengalami penurunan 0,20 Persen atau sebesar minus Rp124.750.889,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/ (Defisit) dari
Kegiatan Operasional
(Rp12.533.070.202,00)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar minus Rp12.533.070.202,00 dan minus Rp14.295.810.525,00 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional periode 30 September 2023 ini merupakan selisih antara Jumlah Pendapatan Rp386.782.700,00 dikurangi dengan Jumlah Beban Operasional sebesar Rp12.919.852.902,00.

Pendapatan
Operasional
Rp386.782.700,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing adalah Rp386.782.700,00 dan Rp280.713.000,00. Adapun yang tergolong ke dalam pendapatan operasional pada BTKLPP Kelas I Batam dalam bentuk Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan.

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp386.782.700,00

Total PNBP Lainnya yang diperoleh BTKLPP Kelas I Batam untuk periode 30 September 2023 adalah Rp386.782.700,00 yang berasal dari hasil Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan. PNBP pada periode 30 September 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar 37,79 Persen dibandingkan periode 30 September 2022 atau naik sebesar Rp106.069.700,00 seperti yang terlihat pada Tabel 26.

Tabel 26
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	30 Sept 2023	30 Sept 2022	Jumlah	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya	386,782,700	280,713,000	106,069,700	37.79
Jumlah	386,782,700	280,713,000	106,069,700	37.79

Dampak dari dinyatakannya kasus Pandemi Covid-19 tidak ada lagi menjadi meningkatnya atau mengalami kenaikan nilai PNBP Triwulan III Tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022. Ini dampak dari keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi bencana Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 ini dimana kebijakan/keputusan pemerintah dengan cepat pada tahun 2023 ini menyatakan bahwa kasus Pandemi Covid-19 tidak ada lagi, sehingga yang dulunya

kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari yang berskala darurat hingga berlevel 1, 2, 3 dan 4. Dicabut. Sehingga di Tahun 2023 ini pendapatan PNBK BTKLPP Kelas I Batam mengalami kenaikan di banding tahun 2022.

Beban Operasional
Rp12.919.852.902,00

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional per 30 September 2023 sebesar Rp12.919.852.902,00 atau mengalami penurunan sebesar 11,37 Persen atau sebanyak Rp1.656.670.623,00 dari beban operasional yang terjadi 30 September 2022 dengan nilai Rp14.576.523.525,00. Tabel 27 menampilkan rincian dari beban operasional tersebut.

Tabel 27
Rincian Beban Operasional
Per 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Sept 2023	30 Sept 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	4,949,033,839	4,815,648,801	133,385,038	2.77
Beban Persediaan	324,985,580	2,377,467,326	(2,052,481,746)	(86.33)
Beban Barang dan Jasa	3,792,885,568	3,198,043,060	594,842,508	18.60
Beban Pemeliharaan	503,095,351	650,531,866	(147,436,515)	(22.66)
Beban Perjalanan Dinas	1,036,301,506	1,140,281,441	(103,979,935)	(9.12)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	5,000,000	(5,000,000)	0
Beban Bunga	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,313,551,058	2,389,551,031	(75,999,973)	(3.18)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Beban Lain-lain	0	0	0	0
Jumlah	12,919,852,902	14,576,523,525	(1,656,670,623)	(11.37)

Peningkatan pendapatan negara dikarenakan kebijakan pemerintah mengambil keputusan yang menyatakan bahwa kasus pandemi Covid-19 sudah tidak ada lagi sehingga berefek terhadap penurunan beban yang harus ditanggung Pemerintah untuk penanganan wabah virus SAR-COV-2 sebesar 11,37 Persen sebagaimana terlihat pada Tabel 27. Akun beban pegawai mengalami peningkatan terbesar yaitu 2,77 Persen. Peningkatan nilai pada akun belanja pegawai ini cukup beralasan karena adanya kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan fungsional. Sedangkan

penurunan dialami pada akun beban persediaan dengan nilai 86,33 Persen.

D.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp4.949.033.839,00

Besaran Beban Pegawai pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp4.949.033.839,00 dan Rp4.815.648.801,00 atau mengalami kenaikan 2,77 Persen yaitu Rp133.385.036,00. Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun perbandingan belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dengan rincian belanja pegawai pada Laporan Operasional memiliki jumlah yang sama yaitu Rp4.949.033.839,00 seperti terlihat pada Tabel 28.

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai
Periode 30 September 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian Jenis	Realisasi Menurut		Selisih Rp
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji	1,803,068,100	1,640,941,200	162,126,900
Beban Pengembalian dan Pembulatan	24,243	22,222	2,021
Beban Tunjangan-tunjangan	756,750,182	707,422,259	49,327,923
Beban Uang Makan	199,600,000	199,600,000	-
Beban Pegawai Tunjangan Khusus	2,189,591,314	2,189,591,314	-
			-
Jumlah	4,949,033,839	4,737,576,995	211,456,844

Beban Persediaan
Rp324.985.580,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp324.985.580,00 dan Rp2.382.467.326,00 atau mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 86,36 Persen dengan nominal Rp2.052.481.746,00 dibandingkan periode yang sama Tahun 2022. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tabel 29 memperlihatkan rincian Beban Persediaan untuk periode 30 September 2023 dan 30 September 2022.

Tabel 29
Rincian Beban Persediaan
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian Jenis	Realisasi 30 September (Rp)		Selisih	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	324,985,580	2,382,467,326	(2,057,481,746)	(86.36)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	324,985,580	2,382,467,326	(2,057,481,746)	(86.36)

Sementara itu, realisasi Beban Persediaan (*netto*) per 30 September 2023 menurut Laporan Operasional (LO) sebesar Rp324.985.580,00 sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercatat Rp519.436.928,00. Dengan demikian terdapat selisih Rp194.451.348,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 30.

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan Menurut LO dan LRA
Periode 30 September 2023

Uraian Jenis Beban	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban/Belanja Persediaan Konsumsi	324,985,580	397,036,928	(72,051,348)
Beban/Belanja Persediaan Pita, Cukai, Materai	-	-	-
Beban/Belanja Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	-	122,400,000	(122,400,000)
Beban/Belanja Persediaan Bahan Baku	-	0	-
Jumlah	324,985,580	519,436,928	(194,451,348)

Adanya selisih antara nilai persediaan pada Laporan operasional dengan nilai persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan sampai dengan 30 September 2023.

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.792.885.568,00

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa sampai dengan 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masingnya adalah Rp3.792.885.568,00 dan Rp3.198.043.060,00. Beban Barang dan Jasa merupakan barang konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa periode 30 September 2023 dan 2022 terlihat pada Tabel 31.

Tabel 31
Rincian Beban Barang dan Jasa
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian Jenis Beban	Jumlah (Rp)		Naik (Turun)	
	30 Sept 2023	30 Sept 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Keperluan Kantor	844,222,834	825,453,819	18,769,015	2.27
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	70,490,000	83,220,000	(12,730,000)	-15.30
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,279,400	4,071,750	(2,792,350)	-68.58
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	121,472,000	148,440,000	(26,968,000)	-18.17
Beban Barang Operasional Lainnya	90,495,470	94,286,489	(3,791,019)	0.00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19		0	0	0.00
Beban Bahan	1,038,081,042	399,644,223	638,436,819	159.75
Beban Honor Output Kegiatan	0	10,950,000	(10,950,000.00)	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	157,245,000	88,234,000	69,011,000	0.00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	0.00
Beban Langganan Listrik	367,780,495	375,191,823	(7,411,328)	-1.98
Beban Langganan Telfon	15,953,282	14,919,476	1,033,806	6.93
Beban Langganan Air	13,287,300	13,486,750	(199,450)	(1.48)
Beban Langganan Daya Jasa dan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Sewa	46,200,000	46,200,000	-	-
Beban Jasa Profesi	0	0	-	-
Beban Jasa Lainnya	1,026,378,745	1,064,332,730	(37,953,985)	(3.57)
Beban Jasa Penanganan Pandemi C	0	29,612,000	(29,612,000)	
Jumlah	3,792,885,568	3,198,043,060	594,842,508.00	18.60

Beban Barang dan Jasa per 30 September 2023 dapat dibandingkan antara realisasi menurut LRA dengan LO, ditemukan selisih Rp189.857.040,00 seperti terlihat pada Tabel 32.

Tabel 32
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
Periode 30 September 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian Jenis Beban	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban/Belanja Barang Operasional	1,127,959,704	1,045,514,384	82,445,320
Beban/Belanja Barang Non Operasional	1,195,326,042	1,136,839,042	58,487,000
Beban/Belanja Jasa	1,469,599,822	1,420,675,102	48,924,720
Jumlah	3,792,885,568	3,603,028,528	189,857,040

Berdasarkan Tabel 32 terdapat selisih nilai realisasi Beban Barang Operasional baik dilihat dari Laporan Operasional maupun Laporan Realisasi Anggaran Yaitu sebesar Rp189.857.040,00.

Beban Pemeliharaan
Rp503.095.351,00

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp503.095.351,00 dan Rp650.531.866,00 atau mengalami penurunan 22,66 Persen sebesar Rp147.436.515,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk menutupi belanja pegawai. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 terlihat pada Tabel 33.

Tabel 33
Rincian Beban Pemeliharaan
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian Jenis Beban	Realisasi per 30 Setember (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105,400,000	66,735,100	38,664,900	57.94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	397,570,351	358,706,766	38,863,585	10.83
Beban Pemeliharaan lainnya	-	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang		222,267,500	(222,267,500)	(100.00)
Beban Persediaan bahan Untuk Pemeliharaan	125,000	2,822,500	(2,697,500)	(95.57)
Jumlah	503,095,351	650,531,866	(147,436,515)	(22.66)

Terdapat selisih Beban Pemeliharaan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp22.121.000,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 34.

Tabel 34
Perbandingan Realisasi Beban Pemeliharaan Menurut LO dan LRA
Periode 30 September 2023

Uraian Jenis Beban	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105,400,000	105,100,000	300,000
Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	397,570,351	375,874,351	21,696,000
Beban/Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
Beban/Belanja Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	125,000	0	125,000
Beban/Belanja Persediaan Suku Cadang		0	-
Jumlah	503,095,351	480,974,351	22,121,000

Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Pemeliharaan dicatat sebagai perolehan pemeliharaan di Neraca, sedangkan Beban Pemeliharaan merupakan pemakaian pemeliharaan sampai dengan periode 30 September 2023.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.036.301.506,00*

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp1.036.301.506,00 dan Rp1.140.281.441,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan yang ada pada BTKLPP Kelas I Batam. Terjadi penurunan beban perjalanan dinas per 30 September 2023 sebesar 9,12 Persen atau sebesar Rp103.979.935,00 dibandingkan periode yang sama Tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga perjalanan dinas untuk kegiatan di hentikan karena adanya rencana Refokusing Anggaran.. Tabel 35 menampilkan rincian Beban Perjalanan Dinas periode 30 September 2023 dan 30 September 2022.

Tabel 35
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi per 30 September (Rp)		Naik (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	934,730,506	938,996,427	(4,265,921)	(0.45)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	101,571,000	133,500,000	(31,929,000)	(23.92)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Codid-19	0	67,785,014.00	(67,785,014)	0.00
Jumlah	1,036,301,506	1,140,281,441	(103,979,935)	(9.12)

Terdapat selisih Belanja Perjalanan Dinas antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp186.049.908,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 36.

Tabel 36
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas Menurut LO dan LRA
Periode 30 September 2023

Uraian Jenis Beban	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Perjalanan Dinas Biasa	934,730,506	766,980,598	167,749,908
Perjalanan Dinas Dalam Kota	101,571,000	83,271,000	18,300,000
Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Jumlah	1,036,301,506	850,251,598	186,049,908

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada Tahun 2016.

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.1.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.313.551.058,00

D.1.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp2.313.551.058,00 dan Rp2.389.551.031,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September 2023 dan 30 September 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 37.

Tabel 37
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah	%
Beban Penyusutan peralatan dan mesin	2,153,615,141	2,227,429,679	(73,814,538)	(3.31)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	154,450,120	154,450,120	0.00	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	1,146,012	1,146,012	0.00	0.00
Beban Amortisasi Software	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Lisensi	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintah	4,339,785	6525220.00	(2,185,435)	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,313,551,058	2,389,551,031	(75,999,973)	(3.18)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00

D.1.2.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Beban Lain-lain
Rp0,00

D.1.2.10. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp192.611.655,00

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp192.611.655,00 dan Rp9.418.842,00. Jumlah tersebut merupakan Surplus Dari Pelepasan Aset Non Lancar dan Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional disajikan pada Tabel 38.

Tabel 38
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode 30 September 2023 dan 30 September 2022

Uraian	Realisasi per 30 September		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.00	5,612,000.00	(5,612,000)	0.00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192,611,655	3,806,842	188,804,813	0.00
Jumlah	192,611,655	9,418,842	183,192,813	1,944.96

Terjadi kenaikan pendapatan dari pos Kegiatan Non Operasional sampai dengan 30 September 2023 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 1.944,96 Persen atau Rp183.192.813,00.

D.2.1. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.2.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Non Lancar per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.612.000,00.

D.2.2.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Non Lancar per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

D.2.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp192.611.655,00 dan Rp9.418.842,00.

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp192.611.655,00 dan Rp3.806.842,00.

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Jika realisasi per 30 September 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada Tabel 39.

Tabel 39
Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode 30 September 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.00	0.00	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192,611,655	192,611,655	-
Jumlah	192,611,655	192,611,655	-

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.3. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Pos Luar Biasa periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp59.068.918.315,00*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp59.068.918.315,00 dan Rp61.692.169.831,00 atau mengalami kenaikan 4,26 Persen sebesar Rp2.623.251.516,00.

*Surplus/Defisit-LO
(Rp12.340.458.547,00)*

E.2. Surplus / Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar minus Rp12.340.458.547,00 dan minus Rp14.286.391.683,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.945.933.136,00. Jumlah Defisit-LO tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan beban sebagaimana telah diuraikan pada Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.

*Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas Rp0,00*

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas ini terdiri dari:

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan untuk periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset

Jumlah selisih revaluasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jumlah koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar minus Rp184.756.400,00 dan Rp0,00.

Lain-lain Rp0,00

E.4. Lain-lain

Pos lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Pos Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas pada prinsipnya berasal dari koreksi dan/atau penyesuaian yang menggunakan akun Ekuitas, Koreksi Nilai Utang Pihak Ketiga, Reklasifikasi Utang Diestimasi, pemotongan atas lebih salur-Piutang PNBK, reklasifikasi Piutang Lain-lain.

Transaksi Antar Entitas
Rp10.642.856.563,00

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp10.642.856.563,00 dan Rp14.161.640.794,00. Dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan transaksi antar entitas sebesar 24,84 Persen atau minus Rp3.518.784.231,00. Tabel 40 berikut menunjukkan jenis transaksi antar entitas.

Tabel 40
Jenis Transaksi Antar Entitas
Periode 30 September 2023

No.	Jenis Transaksi Antar Entitas	Nilai Perolehan (Rp)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	10,840,606,600
2	Diterima dari Entitas Lain	(387,907,429)
3	Transfer Keluar	0.00
4	Transfer Masuk	190,157,392
Jumlah		10,642,856,563

Rincian berikut menguraikan masing-masing jenis Transaksi Antar Entitas.

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah nilai yang Ditagihkan ke Entitas Lain periode 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp10.840.606.600,00 dan Rp12.191.109.119,00 atau mengalami penurunan 11,08 Persen sebesar Rp1.350.502.519,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 30 September 2023.

E.5.2. Diterima Dari Entitas Lain

Jumlah yang Diterima ke Entitas Lain per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar (Rp387.907.429,00) dan (Rp290.003.217,00). Jumlah yang Diterima ke Entitas Lain merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian penerimaan negara sampai dengan 30 September 2023.

E.5.3. Transfer Masuk

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BABUN. Jumlah transfer masuk per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp190.157.392,00 dan Rp2.260.534.892,00. Transfer masuk yang berakhir 30 September 2023 tersebut merupakan *dropping* berupa Barang konsumsi dan barang persediaan lainnya yang berasal dari Sekretariat Jenderal P2P dan Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Yang diterima pada bulan September 2023 dengan Nomor BAST KN.02.03/2/4.8/2023 Transfer masuk tersebut berada dalam kondisi baik.

E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas beban untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 masing-masing yaitu sebesar (Rp1.882.358.384,00) dan (Rp124.750.889,00).

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
(Rp1.882.358.384,00)

Ekuitas Akhir
Rp57.186.559.931,00

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp57.186.559.931,00 dan Rp61.567.418.942,00 atau mengalami kenaikan 0,68 sebesar Rp419.366.389,00. Jumlah Ekuitas periode 30 September 2022 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai aset sebesar Rp62.170.434.425,00 dikurangi nilai kewajiban sebesar Rp603.015.483,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca pada BTKLPP Kelas I Batam.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Beberapa hal penting yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan keuangan BTKLPP Kelas I Batam yang terjadi per 30 September 2023, yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 234/BALAP.5/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 023/BALAP.5/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen. Sejalan dengan aturan tersebut, pada Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Pejabat yang Diberi Kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, serta Bendahara Pengeluaran pada Kantor BTKLPP Kelas I Batam dengan dikeluarkannya SK Nomor HK.02.03/1/2731/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Kuasa Pengguna Anggaran : Budi Santoso, S.K.M., MPH.

Pejabat Pembuat Komitmen : Zulhirdan Siregar, S.T

Pejabat Penanda Tangan /
Penguji SPM : Milyati Suhafni, S.E.

Bendahara : Kery Reflita, SH

2. BTKLPP Kelas I Batam telah melakukan empat kali revisi DIPA selama periode 30 September 2023 terkait efisiensi anggaran terutama akibat dicabutnya kasus pandemi Covid-19 dan hal-hal teknis lainnya yang mengharuskan DIPA direvisi hingga Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Tabel 3 bagian Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

3. Sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor KU.04.03/C.I/9027/2023 Tanggal 07 September 2023 Perihal Penggunaan Akun Khusus Covid-19 bahwasanya bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P tidak lagi menggunakan akun belanja khusus Covid-19 mulai Semester II Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami menyatakan bahwasanya Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam masih menggunakan Akun belanja khusus Covid-19 pada mata anggaran kegiatan 4250.RAB.001.051.A.521841 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Barang yakni Pengadaan BHP Covid-19 senilai Rp55.200.000,00. (Terbilang : Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan kegiatan pengadaan tersebut telah berkontrak mulai tanggal 24 Mei 2023 (pada semester I tahun 2023 sebelum terbitnya surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tentang penggunaan akun khusus Covid-19) dan berakhir kontrak pada tanggal 20 September 2023 (pada semester II tahun 2023) sehingga tidak dapat dibatalkan dan tetap dilakukan proses pembayaran (Nomor SP2D.231371303004157 tanggal 29 September 2023) kegiatan pengadaan tersebut.